

STRATEGI PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (*Development Strategy Of Forest Plantation In East Kalimantan Province*)

Epi Syahadat¹

¹Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan, Jl. Gunungbatu 5, PO Box 272, Bogor 16610
Telp (0251)8633944, Fax (0251)8634924, e-mail : syahadatepi@yahoo.com

Diterima 19 Oktober 2012, disetujui 2 Februari 2013

ABSTRACT

Consumption for raw material of wood industry in Indonesia is around 50-60 million m³ per year, which is 30 million m³ for pulp and paper industry. Most of them is still supplied from natural forest. On the other hand the capacity of wood production from natural forest are limited. To solve this problem Ministry of Forestry will accelerate development of plantation forest. The plan to fulfilling the raw materials timber industry up to 2011 is 53.92 m³, but in reality only 25.86 m³ or 48.3%, and it's expandable considering the target of 2009 that all pulp and paper industry have to use wood raw material from plantation forest. The purpose of this article is to acknowledge the stakeholder some strategy to fullfil a log material needs especially in East Kalimantan Province using SWOT analysis. SWOT analysis indicated that plantation forest development strategy in East Kalimantan Province in the first quadrant and the alternative strategy are SO (strength and opportunities), it is considering that plantation forest resources has a potential market, but it is not optimally exploited yet by the stakeholder of HTI.

Keywords: Plantation forest, development strategy, wood raw material needs

ABSTRAK

Kebutuhan kayu untuk bahan baku industri di Indonesia tercatat 50-60 juta m³ per tahun, di mana sekitar 30 juta m³ adalah untuk keperluan industri pulp dan kertas. Sebagian besar kebutuhan kayu bulat tersebut masih di pasok dari hutan alam. Sedangkan kemampuan hutan produksi alam dalam penyediaan kayu bulat sudah semakin terbatas. Untuk mendukung penyediaan bahan baku, Kementerian Kehutanan akan mempercepat program pembangunan hutan tanaman industri (HTI). Rencana pemenuhan bahan baku industri kayu sampai dengan tahun 2011 sebesar 53,92 m³, baru terealisasi sebesar 25,86 m³ atau 48,3 % (Data Release Dirjen BUK, 2011). Potensi tersebut terus dikembangkan, mengingat pada tahun 2009 semua industri pulp dan kertas harus sudah menggunakan kayu dari hasil hutan tanaman. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui strategi para pihak dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu bulat khususnya di Provinsi Kalimantan Timur menggunakan pendekatan SWOT. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa pembangunan hutan tanaman di Provinsi Kalimantan Timur berada pada kuadran pertama diagram SWOT dan alternatif strategi yang digunakan adalah SO (*strength and opportunities*) dengan pertimbangan bahwa sumberdaya hutan tanaman mempunyai potensi yang cukup besar untuk dipasarkan, akan tetapi belum termanfaatkan secara optimal.

Kata kunci: hutan tanaman, strategi pembangunan, kebutuhan bahan baku kayu

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan kayu untuk bahan baku industri di Indonesia tercatat sebesar 50-60 juta m³ per tahun, sekitar 30 juta m³ adalah untuk keperluan industri pulp dan kertas (IWGFF, 2010). Selama lima tahun terakhir sumbangan bahan baku dari hutan alam kepada industri pulp rata-rata pertahunnya sebesar 54 % dan sisanya dipasok dari hutan tanaman (IWGFF, 2010). Kemampuan hutan produksi alam

dalam penyediaan kayu bulat sudah semakin terbatas. Rencana pemenuhan bahan baku IPHHK sampai dengan tahun 2011 sebesar 52,92 juta m³ baru terealisasi sebesar 25,86 juta m³ (48,3 %). Pemenuhan bahan baku industri dari IUPHHK hutan alam rencana sebesar 5,33 juta m³ baru terealisasi sebesar 2,21 juta m³ atau 41,5 % dan dari IUPHHK hutan tanaman rencana sebesar 23,54 juta m³ baru terealisasi sebesar 9,81 juta m³ atau 41,7%. (Data Release Dirjen BUK, 2011).

Untuk mendukung penyediaan bahan baku, Kementerian Kehutanan akan mempercepat program pembangunan HTI. Rencana pemenuhan kayu bulat dari hutan tanaman (HT) sampai dengan tahun 2011 sebesar 23,54 juta ha baru terealisasi sebesar 9,81 juta ha atau 41,7% (Data Release Dirjen BUK, 2011). Sampai dengan triwulan ke II tahun 2011 IUPHHK-HT berjumlah 245 unit (9,92 juta ha), SK IUPHHK-HT definitif 51 unit (2,06 juta ha), dan IUPHHK-HT dengan Status pencadangan SP1 sebanyak 22 unit (0,58 juta ha) dan SP 2 sebanyak 22 unit (1,15 juta ha) (Data Release Dirjen BUK, 2011).

Untuk terus mendorong pengembangan HTI, diperlukan landasan hukum yang jelas mengenai kepastian dan keamanan lahan. Kepastian hukum dalam kepemilikan lahan diharapkan dapat memberikan semangat baru dalam membangun hutan tanaman. Diantara permasalahan dalam pembangunan hutan tanaman adalah kekurangan permodalan. Adanya kepastian kepemilikan lahan dapat menjadi jaminan untuk memperoleh kredit dari Bank dengan bunga rendah (Anonim, 2009). Berdasarkan data dan informasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sampai dengan tahun 2011, jumlah pemanfaatan kawasan hutan produksi dalam bentuk IUPHHK-HT yang telah mempunyai Ijin Definitif sebanyak 39 unit dan luas areal 1,71 juta ha, sedangkan untuk IUPHHK-HT dengan Ijin Sementara sebanyak 3 unit dan luas areal 18,9 ribu ha, serta IUPHHK Pencadangan sebanyak 1 unit seluas 2.090 ha.

Pembangunan hutan tanaman sebagai bagian integral dari pembangunan kehutanan secara nasional, sangat penting dan strategis untuk mendukung kelangsungan dan keberhasilan pembangunan secara nasional. Keberhasilan pembangunan hutan tanaman dapat dicapai jika terdapat sinergitas antara kekuatan masyarakat, pemerintah, dan industri perkebunan. Demikian pula keberhasilan pengelolaan hutan tanaman sangat bergantung kepada ketiga unsur tersebut (Anonim, 2006). Pembangunan hutan tanaman sangat diperlukan dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat. Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang strategi para pihak dalam pembangunan hutan tanaman untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu bulat khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Sasaran dari penelitian ini adalah menawarkan alternatif solusi dalam pengelolaan

hutan tanaman yang lestari di Provinsi Kalimantan Timur agar sesuai harapan.

II. METODE PENELITIAN

A. Kerangka Pemikiran

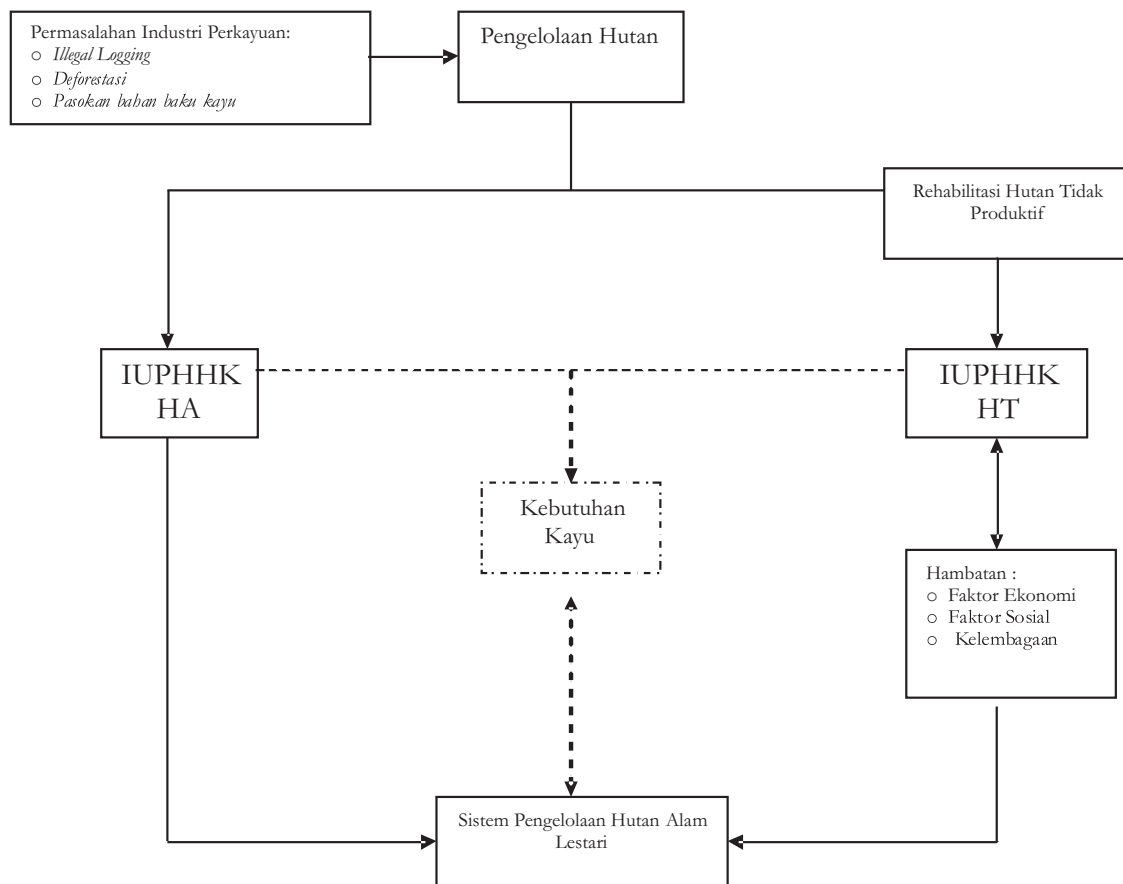
Pemikiran dasar dalam pembangunan HTI adalah upaya menyelenggarakan rehabilitasi kawasan hutan yang tidak/kurang produktif atau terdegradasi agar mampu menghasilkan produk kayu untuk pemenuhan bahan baku kayu industri kehutanan yang mendorong pada pemanfaatan ekonomi. Fenomena kelangkaan kayu dan perubahan struktur ketersediaan kayu telah dirasakan sebelum dekade 1990. Pada awal tahun 1990-an pembangunan hutan tanaman tidak hanya sekedar untuk merehabilitasi hutan yang tidak/kurang produktif, namun secara simultan mempunyai manfaat ekonomi dan lingkungan, artinya perolehan manfaat ekonomi dari areal yang direhabilitasi akan memberi daya dukung ekologi dan lingkungan yang lebih baik pada daur yang ditetapkan, dan dapat dipanen untuk dipergunakan sebagai pasokan bahan baku industri.

Struktur komponen industri yang ada bergeser sesuai dengan fenomena yang terjadi. Lebih dari sekedar memberi peluang investasi skala besar, tetapi ada kemauan politis pihak pemerintah untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dengan membangun hutan tanaman. Salah satu kegiatan pokok yang mendukung kebijakan prioritas dan dinilai sangat strategis dalam pembangunan sektor kehutanan periode lima tahun ke depan adalah upaya mempercepat pembangunan HTI. Pertanyaannya adalah: Bagaimana pelaksanaan percepatan pembangunan HTI dapat diwujudkan dengan segala kompleksitas permasalahan?. Disamping itu, telah diwacanakan dan merupakan ketetapan pemerintah bahwa dari sisi perwujudan pembangunan yang berorientasi pada keramahan lingkungan, maka pada tahun 2009 pasokan bahan baku industri pulp dan kertas diarahkan untuk tidak lagi bertumpu pada hutan alam, yang saat ini dan ke depan harus dikelola secara lebih konservatif (Anonim, 2009).

Sejak lahirnya PP No.7 tahun 1990 tentang HTI telah banyak peraturan yang dibuat untuk mendukung program pembangunan HTI. Banyak aturan-aturan yang memposisikan HTI pada *entity*

business yang harus dibatasi, padahal seharusnya dalam kedudukan sebaliknya. Pada saat itu implementasi pembangunan HTI merupakan upaya yang sangat diatur oleh pemerintah, karena ada keterlibatan dana pemerintah. Sebagai gambaran tentang ketatnya peraturan (*prudent practice*) dalam pembangunan HTI (baik yang dimuat dalam PP No.7 tahun 1990 dan PP No. 34 tahun 2002) adalah, adanya 14 kewajiban yang harus dipatuhi oleh pemegang ijin HTI untuk dilaksanakan dimana 5 (lima) kewajiban diantaranya bila tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pencabutan ijin HTI. Disamping itu terdapat beberapa keluhan yang disampaikan oleh para

praktisi HTI, seperti tidak adanya kepastian usaha, kesulitan pemasaran, harga *logs* yang tidak kompetitif, investasi besar dengan waktu panen yang lama dengan resiko kegagalan yang tinggi, pro kontra terhadap jenis tanaman monokultur dengan kekhawatiran rentannya resistensi tanaman monokultur terhadap hama dan penyakit, keengganan perbankan untuk mengucurkan kredit, adanya praktek *illegal logging* yang menyebabkan rendahnya harga kayu HTI, bahkan biaya produksi jauh lebih tinggi dibandingkan hasil penjualan (Anonim, 2009). Secara skematis kerangka pemikiran tersebut, terlihat seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka pemikiran
Figure 1. Analytical Framework

B. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dengan cara menyiapkan kuisisioner dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan berbagai pihak seperti pemilik Perusahaan HTI, Pejabat Dinas Kehutanan yang

mengurusi kegiatan HTI, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan instansi terkait. Data sekunder, seperti : kondisi umum Provinsi Kalimantan Timur, luas kawasan hutan berdasarkan peta penunjukan kawasan dari Kementerian Kehutanan, jumlah perusahaan IUPHHK-HT, data informasi mengenai

pemanfaatan kawasan hutan, dan lain sebagainya. Pemilihan perusahaan HTI dilakukan berdasarkan status perijinan (SK definitif, SK Sementara, dan Pencadangan), untuk mendapatkan berbagai pendapat dan kondisi yang beragam mengenai pembangunan hutan tanaman di Provinsi Kalimantan Timur. Dari masing-masing instansi/unit kerja di atas yang dijadikan sampel penelitian minimal 2 (dua) responden. Penentuan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2004), yaitu tidak semua orang/pihak mengetahui, memahami, terlibat dan terkena dampak dalam pelaksanaan IUPHHK hutan tanaman.

C. Analisis Data

Dalam merumuskan strategi pembangunan hutan tanaman di Kalimantan Timur digunakan analisis SWOT. Analisis SWOT dibatasi pada kajian sektoral dimana kehutanan dan industri kehutanan ditetapkan sebagai lingkungan internal, sedangkan lingkungan eksternal mencakup keseluruhan lingkungan di luar sektor kehutanan dan industri kehutanan. Faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman dilakukan identifikasi dan evaluasi.

Faktor internal yang diidentifikasi dan di evaluasi meliputi empat aspek, yaitu : (a) sumberdaya bahan baku, (b) industri perikanan, (c) kelembagaan, serta (d) pasar dan perdagangan produk perikanan; sedangkan faktor eksternal meliputi bidang (a) sosial dan budaya, (b) ekonomi politik, (c) lingkungan global dan (d) teknologi. Faktor-faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi, kemudian diberikan bobot (*weighting*) dan peringkat (*rating*) untuk menentukan lima faktor yang paling dominan dalam masing-masing kolom kekuatan

(*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Faktor-faktor yang paling dominan kemudian dimasukkan dalam Matriks SWOT. Menurut Rangkuti (2006), hasil analisa SWOT tersebut dapat menghasilkan 4 (empat) kemungkinan strategi alternatif, yaitu :

Strategi *Strength-Opportunities* (SO). Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

Strategi *Weaknesses-Opportunities* (WO), strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

Strategi *Strength-Threats* (ST), ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

Strategi *Weaknesses-Threats* (WT), strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Sebagai contoh, sub strategi S-O dirumuskan dengan melihat lima faktor kekuatan (*strengths*) serta mempertimbangkan lima faktor peluang (*opportunities*). Dengan perkataan lain, sub strategi tersebut dirumuskan dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada.

III. GAMBARAN UMUM KEHUTANAN KALIMANTAN TIMUR

A. Luas Kawasan Hutan dan Pemanfaatannya

Provinsi Kalimantan Timur, secara geografis terletak antara 113°44' Bujur Timur dan 119°00'

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 79/2001 di Provinsi Kalimantan Timur.

Table 1. The Forest Area Based on Forest Ministry Decree Numbre 79/ 2001 in East Kalimantan Province.

No	Kawasan Hutan /Forest Area	Luas/Area (Ha)
1	Hutan Suaka Alam/ Margasatwa/Konservasi	2.165.198
2	Hutan Lindung (HL)	2.751.702
3	Hutan Produksi Tetap (HP)	5.121.688
4	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	4.612.965
5	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	-
Jumlah		14.651.553

Sumber (Source): Direktorat Jenderal Planologi, 2011. (*Directorate General of Forestry Planning, 2011*).

Bujur Barat, serta 4°24' Lintang Utara dan 2°25' Lintang Selatan dengan wilayah seluas 208.657,74 km atau seluas satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura (Dirjen Planologi, 2011). Pada Tabel 1 dapat dilihat luas wilayah kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan dan perairan sebagaimana ditetapkan SK Menteri Kehutanan No. 79/ Menhut-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 seluas 14.651.553 ha. Pembangunan hutan tanaman dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi (HP) maupun kawasan hutan produksi terbatas (HPT). Apabila melihat luasan kawasan hutan tersebut, peluang pertumbuhan pembangunan hutan tanaman di Provinsi Kalimantan Timur sangat besar.

Luas kawasan seluruh hutan produksi adalah 9,73 juta ha dan dimanfaatkan untuk IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, Pencadangan areal HTR dan Penetapan areal HKM seluas 7,39

juta ha (telah terbit SK nya). Pembangunan IUPHHK hutan tanaman sendiri seluas 1,73 juta ha, terdiri atas 42 unit ijin (IUPHHK-HT yang sudah memiliki ijin definitif maupun ijin sementara) dan 1 (satu) lokasi untuk pencadangan areal HTR seluas 2.090 ha (Dirjen Planologi, 2011).

B. Perkembangan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Pada Tabel 2 dapat dilihat secara rinci, perkembangan hutan tanaman di Provinsi Kalimantan Timur, yang terbagi pada : 1) Yang telah memiliki SK Definitif seluas 1.711.868 ha atau sebesar 98,79 % dari luas lahan kawasan hutan produksi yang dimanfaatkan oleh 39 unit hutan tanaman; 2) SK Sementara seluas 18.900 ha atau 1,09 % dimanfaatkan oleh 3 (tiga) unit hutan tanaman; dan 3) SK Pencadangan seluas 2.090 ha atau 0,12 % dimanfaatkan oleh 1 (satu) unit hutan tanaman. Secara rinci, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. IUPHHK-HTI di Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2010.

Table 2. The Area Of Plantation Forest in East Kalimantan Province Up To 2010)

No	Jenis Surat Keputusan (SK)/Kind of Decree	Unit/Unit	Luas/Area (Ha)
1	SK Definitif	39	1.711.868
2	SK Sementara	3	18.900
3	SK Pencadangan	1	2.090
Jumlah		43	1.732.758

Sumber (Source): Direktorat Jenderal Planologi, 2011. (diolah dari data Ditjen BUK dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) (Directorate General of Forestry Planning, 2011.(processed data from the Directorate General of BUK and East Kalimantan Province Forest Service)).

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, IUPHHK-HT pertukangan terdaftar dan aktif sampai dengan tahun 2011 sebanyak 12 unit dengan luas 393.586 ha, IUPHHK-Pulp terdaftar dan aktif sebanyak 9 (sembilan) unit dengan luas 862.565 ha, dan IUPHHK Transmigrasi yang masih aktif sebanyak 11 unit dengan luas areal 212.768 ha, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.

C. Target dan Realisasi Pembangunan Hutan Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa target pembangunan HTI pulp lebih besar dibandingkan dengan pembangunan HTI jenis lainnya. HTI pulp merupakan bagian dari grup perusahaan, dan tidak menghadapi kendala memadai seperti permodalan, pemasaran, sumberdaya manusia dan kebutuhan

bahan baku kayunya cukup besar, sedangkan HTI pertukangan dan HTI transmigrasi menghadapi kendala permodalan dan pemasaran kayu, terlebih setelah dicabutnya pinjaman permodalan dari Dana Reboisasi (DR).

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa realisasi penanaman kayu pada HTI pulp lebih luas dibandingkan dengan HTI pertukangan maupun HTI transmigrasi. Hal tersebut antara lain karena pemasaran hasil kayu pulp sudah pasti untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pulp bagi grup perusahaannya.

Pada Tabel 6 berikut dapat dilihat Realisasi RKT IUPHHK hutan tanaman di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2007.

Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa realisasi penanaman kayu untuk hutan tanaman adalah sebesar 44,41 % dari target penanaman pada tahun

Tabel 3. Daftar IUPHHK-HT Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan 2011

Table 3. List of Plantations Forest in East Kalimantan up to 2011

No	Nama perusahaan/ <i>Company name</i>	No SK IUPHHK/ <i>No of IUPHHK Decree</i>	Luas/ <i>Area</i> (ha)	Keterangan/ <i>Remarks</i>
1	2	3	4	5
I IUPHHK Pertukangan				
1	PT Inhutani I Batu Ampar	239/Kpts-II/1998, 27 Februari 1998	16.521,00	Aktif
2	PT Sumalindo HJ II S Mao	675/Kpts-II/1997, 10 Oktober 1997	70.300,00	Aktif
3	PT Inhutani I Long Nah	611/Kpts-II/1997, 19 September 1997	50.295,00	Aktif
4	PT Oceanic Timber Product	IPP.480 /Kpts-II/1989, 3 Juli 1989	15.700,00	Tidak Aktif
5	PT Sumalindo HJ S Pesab	407/Kpts-II/1996, 5 Agustus 1996	10.000,00	Aktif
6	PT Barito Pacific	IPP.1019/Menhut-VI/1991, 20 Juli 1991	21.305,00	Aktif
7	PT Sangkulirang	983/V/HTI-3-1991, 26 Juni 1991	30.000,00	Tidak Aktif
8	PT Wana Kalti Lestari	6/Kpts-II/1998, 5 Januari 1998	16.280,00	Tidak Aktif
9	PT Inhutani II Tanah Grogot	109/Kpts-II/1991, 21 Februari 1991	17.200,00	Aktif
10	PT Riau Timas	155/DJRRL/V/1989, 23 Februari 1989	35.000,00	Tidak Aktif
11	PT Sendawar Adhi Karya	2/Menhut-II/2008, 3 Januari 2008	25.400,00	Aktif
12	PT Intraca Hutani Lestari	838/Kpts-II/1999, 5 Oktober 1999	42.050,00	Aktif
13	PT Tirta Mahakam Resources	328/Menhut-II/2010, 25 Mei 2010	41.735,00	Aktif
14	PT Mahakam Persada Sakti	619/Menhut-II/2010, 4 November 2010	25.410,00	Aktif
15	PT Sylvaduta Corporation	415/Menhut-II/2009, 9 Juli 2009	47.025,00	Aktif
16	PT Buana Inti Energi	631/Menhut-II/2010, 11 November 2010	26.345,00	Aktif
Jumlah I			490.566,00	
II IUPHHK Pulp				
1	PT ITCI Hutani Manunggal	184/Kpts-II/ 1996, 23 April 1996	161.127,00	Aktif
2	PT Surya Hutani Jaya	156/ Kpts-II/1996, 22 Juli 1996	183.300,00	Aktif
3	PT Fajar Surya Sedaya	383/Kpts-II/1997, 22 Juli 1997	66.659,00	Aktif
4	PT Tanjung Redeb Hutani	641/Kpts-II/1996, 8 Oktober 1996	180.330,00	Aktif
5	PT Adindo Hutani Lestari	88/Kpts-II/1996, 12 Maret 1996	201.821,00	Aktif
6	PT Inhutani I Sesayap	142/Kpts-II/1984	7.643,00	Aktif
7	PT Aacia Andalan Utama	87/Menhut-II/2007, 22 Maret 2007	39.620,00	Aktif
8	PT Kelawit Wana Lestari	169/Menhut-II/2005, 16 Juni 2005	22.065,00	Aktif
Jumlah II			862.565,00	
III IUPHHK Transmigrasi				
1	PT Bhineka Wana	61/Kpts-II/ 1997, 28 Januari 1997	9.945,00	Aktif
2	PT Hutan Kesuma	339/Kpts-II/1998, 27 Juli 1998	14.253,00	Aktif
3	PT Kiani Hutan Lestari	838/Kpts-II/1992, 25 Agustus 1992	53.083,00	Tidak Aktif
4	PT Malapi Timber	252/Kpts-II/1992, 21 Februari 1992	13.650,00	Tidak Aktif
5	PT Sumalindo SJ Ma Karangan	722/Kpts-II/1996, 11 November 1996	24.500,00	Aktif
6	PT Belantara Persada	779/Kpts-II/1997, 27 Desember 1997	17.150,00	Aktif
7	PT Belantara Subur	784/Kpts-II/1996, 19 September 1996	16.475,00	Aktif
8	PT Taman Daulat Wananusa	362/Kpts-II/1997, 14 Juli 1997	13.400,00	Aktif
9	PT Hutan Trans Kencana	247/Kpts-II/1992, 21 Februari 1997	9.300,00	Tidak Aktif
10	PT Anangga Pudinusa	331/Kpts-II/1998, 27 Februari 1998	31.100,00	Aktif
11	PT Hutan Mahligai	244/Kpts-II/1992, 22 Februari 1992	11.275,00	Aktif
12	PT Kelawit Hutan Lestari	160/Kpts-II/1997, 21 Februari 1997	9.180,00	Aktif
13	PT Inhutani I Melak	15/Kpts-II/1998, 25 Maret 1998	66.800,00	Tidak Aktif
14	PT Dirga Rimba	253/Kpts-II/1992, 21 Februari 1992	5.000,00	Tidak Aktif
15	PT Rimba Raya Lestari	300Menhut-II/2007, 3 September 2007	17.330,00	Tidak Aktif
16	PT Sumalindo Alam Lestari Unit 1	267/Menhut-II/2009, 11 Mei 2009	32.550,00	Aktif
17	PT Belantara Pusaka	20/Kpts-II/1998, 7 Januari 1998	15.610,00	Aktif
18	PT Tuffindo Wana Lestari	593.45/265/DKB-I, 25 Februari 2002	22.400,00	Tidak Aktif
19	PT Estetika Rimba	240/Kpts-II/1992, 21 Februari 1992	5.000,00	Tidak Aktif
Jumlah III			388.001,00	
43	Total		1.741.132,00	

Sumber (*Source*) : Statistik Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 2011. (*East Kalimantan Province Forestry Statistics, 2011*).

2007, di mana 41,55 % atau 93,55 % dari realisasi hutan tanaman merupakan penanaman kayu dari IUPHHK HTI pulp. Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi volume produksi kayu mencapai 23,05 % di mana 12,97 % merupakan kayu dari IUPHHK HTI pulp.

Dari data tersebut bahwa IUPHHK HT di Provinsi Kalimantan Timur sudah berjalan, walaupun belum mencapai seperti apa yang diharapkan. Investasi untuk pembangunan hutan tanaman pun sudah cukup besar yang apabila dikalikan dengan Standar Biaya Pembangunan HTI

Tabel 4. Target Pembangunan Hutan Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur s/d tahun 2007.

Table 4. Development Target of Forest Plantation in East Kalimantan Province up to 2007

No	Jenis HTI/Kind of Forest plantation	Tanam/Planting (Ha)	Panen/Harvest (Ha)	Volume/Volume (m ³)
1	HTI Pertukangan	19.403,00	10.436,67	515.212,80
2	HTI PULP	82.626,58	36.388,44	2.029.913,79
3	HTI Transmigrasi	10.580,04	3.741,43	382.541,15
Jumlah		112.609,62	50.566,54	2.927.667,74

Sumber (Source): Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 2008. (East Kalimantan Province Forest Service, 2008)

Tabel 5. Realisasi Pembangunan Hutan Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur s/d tahun 2007

Table 5. Forest Plantation Development Realization In East Kalimantan Province up to 2007

No	Jenis HTI/Kind of Forest plantation	Tanam/Planting (Ha)	Panen/Harvest (Ha)	Volume/Volume (m ³)
1	HTI Pertukangan	1.828,62	1.173,00	103.517,17
2	HTI PULP	46.785,00	2.141,79	380.196,00
3	HTI Transmigrasi	1.392,22	2.092,29	191.156,15
Jumlah		50.005,84	5.407,08	674.869,32

Sumber (source): Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 2008. (East Kalimantan Province Forest Service, 2008)

Tabel. 6 Realisasi RKT IUPHHK Hutan Tanaman Tahun 2007 di Provinsi Kalimantan Timur.

Table 6. Forest Plantation Annual Working Planning Realization in Year of 2007 in East Kalimantan Province.

No	Nama Perusahaan/ Company name (Luas/Area Ha)	NO SK & Tanggal HPHTI Decree no & date	Target/Target			Realisasi/Realization			Jenis Tanaman/ Type of Plants
			Tanam/Planting	Panen/Harvest	Volume/Volume	Tanam/Planting	Panen/Harvest	Volume/Volume	
I	IUPHHK Pertukangan								
1	PT. Inhutani I Long Nah (50.295)	611/Kpts-II/1997 Tanggal 19-9-1997	1.455,00	1.142,00	85.098,00	400,00	996,00	76.781,00	Sengon, Akasia M, Falcataria
2	PT. Inhutani I Batu Ampar (16.521)	239/Kpts-II/1998 Tanggal 27-2-1998	1.000,00	-	220,00	50,00	-	-	Akasia Mangium
3	PT. Oceanias Timber Product (15.000)	480/DJRRL/V/1989 Tanggal 3-7-1989	-	-	-	-	-	-	-
4	PT. Inhutani II Tanah Grogot (17.200)	109/Kpts-II/1991 Tanggal 21-2-1991	505,00	750,67	90.894,00	223,62	175,00	24.674,17	Akasia M, G arborea
5	PT. Sumalindo Hutani Jaya II Sei Mao (70.300)	675/Kpts-II/1997 Tanggal 10-10-1997	5.125,00	700,00	70.000,00	1.155,00	-	-	Akasia M, P Falcataria
6	PT. Sumalindo Hutani Jaya II Sei Pesab (10.000)	407/Kpts-II/1996 Tanggal 5-8-1996	1.000,00	4500,00	230.000,00	-	2,00	2.062,00	Akasia M, P Falcataria, G arborea, eucalyptus
7	PT. Taman Daulat Wananusa (13.400)	362/Kpts-II/1997 Tanggal 14-7-1997	-	-	-	-	-	-	-
8	PT. Intraca Hutani Lestari (46.500)	13/Kpts-II/1997 Tanggal 6-1-1997	10.318,00	3.344,00	39.000,00	-	-	-	Sengon, Jabon, G Arborea
	Jumlah I		19.402,42	10.436,67	515.212,80	1.828,62	1.173,00	103.517,17	
II	IUPHHK PULP								
1	PT. Tanjung Redeb Hutani (180.330)	641/Kpts-II/1996 Tanggal 8-10-1996	19.986,01	18.631,32	738.567,93	-	-	-	Akasia M, G arborea
2	PT. Inhutani I Sesayap (Tarakan) (7.643,49)	142/Kpts-II/1984 Tanggal 17-7-1984	-	2.074,00	55.250,00	-	-	-	Akasia M, P Falcataria, eucalyptus
3	PT. ITCI Hutani Manunggal (161.127)	184/Kpts-II/1996 Tanggal 23-4-1996	12.000,00	6.976,00	532.462,00	12.000,00	652,79	64.762,00	Akasia M, G arborea
4	PT. Adindo Hutani Lestari (201.821)	88/Kpts-II/1996 Tanggal 12-3-1996	17.758,57	-	-	10.189,00	-	-	Akasia M, P Falcataria
5	PT. Surya Hutani Jaya (183.300)	156/Kpts-II/1996 Tanggal 8-1996	32.882,00	8.707,12	703.633,86	24.596,00	1.489,00	315.434,00	Akasia M, G arborea, E deglupta
	Jumlah II		82.626,58	36.388,44	2.029.913,79	46.785,00	2.141,79	380.196,00	
III	IUPHHK Transmigrasi								
1	PT. Sumalindo Lestari Jaya I Batu Putih (12.076)	80/Kpts-II/1997 Tanggal 6-2-1997	3.500,00	1.000,00	150.000,00	716,00	409,00	75.564,00	G arborea, tektona grandis, P Falcataria
2	PT. Sumalindo Lestari Jaya II Ma. Karangan (24.500)	722/Kpts-II/1996 Tanggal 11-11-1996	2.000,00	1.000,00	100.000,00	227,00	326,00	26.794,00	P Falcataria, G arborea
3	PT. Hutan Mahligai (11.275)	47/Menhut-II/2006 Tanggal 6-3-2006	580,04	656,17	51.243,00	-	272,03	7.500,00	Sengon, G arborea
4	PT. Belantara Subur (16.475)	80/Kpts-II/1997 Tanggal 6-2-1997	1.000,00	1.085,26	81.298,15	449,22	1.085,26	81.298,15	Akasia M, P Falcataria, G arborea, Akasia Mangium
5	PT. Kelawit Wana Lestari (22.065)	169/Menhut-II/2005 Tanggal 16-6-2005	3.500,00	-	-	-	-	-	-
	Jumlah III		10.580,04	3.741,43	382.541,15	1.392,22	2.092,29	191.156,15	
	Jumlah I + II + III		112.609,62	50.566,54	2.927.667,74	50.005,84	5.407,08	674.869,32	

Sumber (Source): Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 2008. (East Kalimantan Province Forest Service, 2008)

berdasarkan Permenhut Nomor P.48/Menhut-II/2008 sebesar Rp 9.578.350 per ha, berarti investasi pembangunan hutan tanaman tersebut sudah mencapai \pm Rp 478 Milyar. Dari data tersebut tampak keseriusan pemerintah dan *stakeholder* (pemegang IUPHHK) dalam membangun hutan tanaman di Provinsi Kalimantan Timur sangat tinggi. Artinya terlihat ada keinginan dari semua pihak untuk membangun lahan yang sudah tidak produktif untuk memenuhi target pembangunan hutan tanaman secara nasional, walaupun dalam pelaksanaannya belum maksimal. Indikator belum maksimalnya dalam pembangunan hutan tanaman diantaranya adalah masih ada konflik sosial antara pemegang IUPHHK hutan tanaman dengan masyarakat setempat berkaitan dengan lahan atau areal yang dijadikan pembangunan hutan tanaman.

D. Permasalahan dalam Pembangunan Hutan Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur

- 1) Ketidak jelasan dan ketidak tegasan pemerintah sebagai regulator dalam kaitannya dengan hak-hak adat atas lahan masyarakat maupun hukum adat, berdampak pada timbulnya konflik sosial yang berkepanjangan. Penanggulangan konflik sosial selama ini dilakukan hanya berdasarkan kepada kesepakatan antara pihak yang berselisih.
- 2) Kelembagaan atau organisasi sosial masyarakat setempat masih belum berjalan secara optimal. Dilain pihak para pejabat di daerah juga umumnya belum bisa berperan secara memadai, dalam upaya mencari solusi terhadap permasalahan - permasalahan yang muncul di masyarakat di wilayah kewenangannya. Diharapkan agar adanya tokoh adat, tokoh agama maupun pejabat daerah yang dapat mengkonsolidasikan keadaan dimana kepentingan pemerintah, masyarakat dan perusahaan dapat berjalan beriringan saling menghormati dan menghargai peran masing-masing, sehingga investasi yang ada dapat terjaga, lapangan kerja bisa tumbuh secara proporsional, dan pembangunan di daerah berjalan baik.
- 3) Birokrasi yang berbelit dalam pemberian ijin IUPHHK-HTI. Adanya niat pemerintah untuk memberikan kemudahan, penyederhanaan, memperpendek dan mempercepat prosedur perolehan ijin IUPHHK-HTI harus terus diupayakan.

- 4) Provokasi, tuntutan, gugatan/klaim masyarakat setempat terhadap tata batas lahan adat atau hutan adat (*land tenure*). Umumnya konflik sosial akan lebih berkembang dan sulit diatasi apabila ada pengaruh dari luar dan atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan lainnya.
- 5) Komunikasi yang lemah antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), antar pemerintah dengan masyarakat, antara pemerintah dengan perusahaan pemegang IUPHHK-HTI dan perusahaan pemegang IUPHHK-HTI dengan masyarakat yang mempunyai hubungan yang kurang baik dan tidak berkembang dengan sehat, sering menjadi penyebab terjadinya konflik dan solusinya tidak pernah ditemukan.

Dari kelima permasalahan tersebut permasalahan yang paling dominan adalah ketidak jelasan dan ketidak tegasan pemerintah sebagai regulator dalam kaitannya dengan hak-hak adat atas lahan masyarakat maupun hukum adat, berdampak pada timbulnya konflik sosial yang berkepanjangan.

IV. HASIL PEMBAHASAN

A. Analisis SWOT

Analisis SWOT dilakukan pada faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal, yang secara langsung dapat mempengaruhi usaha pembangunan hutan tanaman di Provinsi Kalimantan Timur. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

- a. Kekuatan (*Strengths*), yaitu faktor-faktor yang mempunyai kekuatan dalam pembangunan hutan tanaman di Provinsi Kalimantan Timur, seperti:

Sumber Daya Hutan (SDH) meliputi luas, jenis pohon, potensi riap tinggi.

Komitmen pemerintah yang tinggi untuk melestarikan hutan, memajukan industri dan menggalakan ekspor.

Daya saing produk industri primer tinggi, net ekspor masih berlangsung.

Komitmen semua pihak terhadap desentralisasi tinggi.

Nilai aset (kapasitas) besar, orientasi ekspor, penguasaan teknologi cukup memadai.

- b. Kelemahan (*Weaknesses*), yaitu faktor-faktor yang dianggap sebagai kelemahan dalam pembangunan hutan tanaman di Provinsi Kalimantan Timur, seperti:

Pendapatan dari HTI bersifat jangka panjang.
Harga kayu hasil dari HTI lebih rendah (<) dari harga kayu hutan alam.

Sulit memperoleh areal HTI yang solid dan bebas konflik (*clean and clear*).

Usaha HTI harus berinvestasi terlebih dahulu.

Kelembagaan HTI lemah (sistem perundang-undangan belum terintegrasi).

2. Faktor Eksternal.

- a. Peluang (*Opportunities*), yaitu faktor-faktor yang dianggap menjadi peluang dalam pembangunan hutan tanaman di Provinsi Kalimantan Timur, seperti:

Nilai produk kayu hutan tanaman tinggi.

Tersedianya teknologi maju.

Kepedulian masyarakat internasional terhadap hutan Indonesia.

Pangsa pasar terbuka luas.

Supply tenaga kerja cukup.

- b. Ancaman (*Threats*), yaitu faktor-faktor yang dianggap sebagai ancaman dalam pembangunan hutan tanaman di Provinsi Kalimantan Timur, seperti:

Kesenjangan pendapatan dan ketidakadilan sosial, ekonomi dan lain sebagainya.

Kemiskinan masyarakat disekitar hutan dan kesulitan dalam mengendalikan konflik sosial.

Produktivitas tenaga kerja rendah.

Illegal logging masih belum dapat diatasi.

Penegakan hukum lemah.

Dari faktor-faktor lingkungan (lingkungan internal dan lingkungan eksternal) yang berpengaruh dalam pembangunan hutan tanaman di Provinsi Kalimantan Timur, kemudian disusun faktor mana yang menjadi prioritas dalam penanganannya atau faktor yang lebih diutamakan untuk diselesaikan. Pada Tabel 7 dapat dilihat rekapitulasi hasil jawaban responden terhadap faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh dalam pembangunan hutan tanaman, hasil rekapitulasi tersebut diperoleh atas dasar jawaban responden terhadap kuisisioner yang diberikan.

B. Strategi Pengembangan HTI dengan Pendekatan SWOT

Untuk merumuskan strategi pembangunan hutan tanaman di Provinsi Kalimantan Timur digunakan analisis SWOT. Analisis SWOT dibatasi pada kajian sektoral dimana sektor kehutanan dan industri kehutanan ditetapkan sebagai lingkungan internal, sedangkan lingkungan eksternal mencakup keseluruhan lingkungan di luar sektor kehutanan dan industri kehutanan. Pada umumnya lingkungan internal dapat dikendalikan oleh institusi kehutanan yang terkait, baik institusi pemerintah maupun swasta, sedangkan lingkungan eksternal sulit untuk dikendalikan.

Langkah awal dalam perumusan strategi pembangunan hutan tanaman di Provinsi Kalimantan Timur adalah melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman. Faktor internal meliputi empat aspek yaitu sumberdaya hutan tanaman, kelembagaan, industri perkayuan serta pasar, sedangkan faktor eksternal meliputi bidang sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan global. Faktor internal dan eksternal diidentifikasi, serta diberikan bobot (*weightening*) dan peringkat (*rating*) untuk menentukan 5 (lima) faktor yang paling dominan dalam masing-masing kolom kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Selanjutnya faktor-faktor yang paling dominan tersebut dimasukkan dalam matriks SWOT untuk menentukan sub strategi S-O (kekuatan-peluang), sub strategi S-T (kekuatan-ancaman), sub strategi W-O (kelemahan-peluang), dan sub strategi W-T (kelemahan-ancaman).

Hasil analisa SWOT menghasilkan empat kemungkinan strategi alternatif, yaitu:

1. Strategi SO (*Strength and Opportunities*), yaitu strategi yang mengoptimalkan kekuatan (*strength*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*), yaitu:

- a. Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) hutan tanaman secara intensif dan kompetitif
- b. Pengembangan industri perkayuan berorientasi ekspor.
- c. Pengembangan ekspor produk kayu hutan tanaman yang mempunyai nilai tambah tinggi

Tabel 7. Rekapitulasi Faktor-faktor Lingkungan Yang Menjadi Prioritas Utama.

Table 7. Recapitulation Environment Factors as a First Priority

No	Uraian/Description
1	<p>Faktor Lingkungan Internal</p> <p>a. Kekuatan :</p> <p>Sumber Daya Hutan (SDH) luas, jenis beragam, potensi riap tinggi belum dimanfaatkan.</p> <p>Komitmen semua pihak terhadap desentralisasi tinggi.</p> <p>Komitmen pemerintah untuk melestarikan hutan, memajukan industri dan menggalakan ekspor tinggi.</p> <p>Daya saing produk industri primer tinggi, net ekspor masih berlangsung.</p> <p>Nilai aset (kapasitas) besar, orientasi ekspor, penguasaan teknologi cukup memadai.</p> <p>b. Kelemahan :</p> <p>Pendapatan dari HTI bersifat jangka panjang.</p> <p>Usaha hutan alam lebih menarik dibandingkan dengan usaha HTI.</p> <p>Kelembagaan HTI lemah (sistem perundang-undangan belum terintegrasi).</p> <p>Sulitnya memperoleh areal HTI yang solid dan bebas konflik (<i>clean and clear</i>).</p> <p>Harga kayu hasil dari HTI lebih kecil (<) dari harga kayu hutan alam.</p>
2	<p>Faktor Lingkungan Eksternal</p> <p>a. Peluang :</p> <p>Kepedulian masyarakat internasional terhadap hutan Indonesia.</p> <p>Tersedianya teknologi maju.</p> <p>Pangsa pasar terbuka luas.</p> <p>Supply tenaga kerja cukup</p> <p>Nilai produk kayu hutan tanaman tinggi.</p> <p>b. Ancaman :</p> <p>Penegakan hukum lemah.</p> <p>Kesenjangan dan ketidakadilan faktor sosial, ekonomi dan lain sebagainya.</p> <p>Illegal logging masih belum dapat diatasi.</p> <p>Kemiskinan masyarakat disekitar hutan dan kesulitan dalam mengendalikan konflik sosial.</p> <p>Produktivitas tenaga kerja rendah.</p>

Sumber (Source) : Data diolah (Calculated data)

2. Strategi WO (*Weaknesses and Opportunities*), yaitu strategi yang meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*), yaitu :
 - a. Pengelolaan hutan tanaman yang ada secara ekstensif dan pemanfaatan sumber bahan baku alternatif
 - b. Pengembangan industri perikanan sekunder yang berorientasi pasar domestik tanpa mengabaikan produk kayu primer untuk di ekspor
 - c. Pengembangan pasar domestik produk kayu dari hutan tanaman.
3. Strategi ST (*Strength and Threats*), yaitu strategi yang menggunakan kekuatan (*strength*) untuk mengatasi ancaman (*threats*), yaitu :
 - a. Pengelolaan hutan tanaman intensif dan kolaboratif.
 - b. Pengembangan industri perikanan sekunder berskala kecil dan menengah yang mampu menyesuaikan dengan perubahan pasar dan teknologi.
 - c. Diversifikasi produk dan pengalihan pasar.
4. Strategi WT (*Weaknesses and Threats*), yaitu strategi yang meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan menghindari ancaman (*threats*), yaitu :
 - a. Pembangunan hutan tanaman pada lahan non produktif secara kolaboratif.
 - b. Pemanfaatan sumber bahan baku alternatif dan peningkatan efisiensi pengolahan
 - c. Mempertahankan pasar yang ada atau mengalihkan pasar.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, pembangunan hutan tanaman di Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam Kuadran Pertama pada diagram SWOT (lihat Gambar 2). Alternatif strategi yang digunakan adalah SO (*Strength and Opportunities*), dengan pertimbangan bahwa hutan tanaman mempunyai potensi yang cukup besar untuk dipasarkan, akan tetapi belum termanfaatkan secara optimal. Untuk itu dalam mengembangkan pembangunan hutan tanaman di Provinsi Kalimantan Timur harus menciptakan strategi dengan menggunakan kekuatan (*strength*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*). Atas dasar hasil analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal (SWOT) tersebut, maka kebijakan pembangunan hutan tanaman di Provinsi Kalimantan Timur diarahkan untuk :

1. Memberi kesempatan kepada semua pihak (*stakeholders*) dalam membangun hutan tanaman, mengikutsertakan *stakeholder* tersebut dengan harapan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan masyarakat serta mendorong kelestarian sumber daya alam.
2. Meningkatkan keterpaduan perencanaan pengembangan wilayah yang mampu menjadi penggerak perekonomian lokal dan nasional secara berkesinambungan.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya konservasi sumber daya alam.

C. Aspek dalam Pembangunan Hutan Tanaman

Dalam pembangunan hutan tanaman, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Arah pembangunan nasional

Arah pembangunan nasional ditujukan untuk menumbuhkan perekonomian nasional maupun daerah, meningkatkan devisa, mendorong pembangunan daerah, memperluas dan memberikan kesempatan kerja dan usaha yang dapat meningkatkan PAD maupun kesejahteraan masyarakat luas, memperkaya dan memantapkan budaya bangsa. Pembangunan hutan tanaman harus tetap mengacu pada kebijakan pembangunan kehutanan nasional.

2. Perencanaan kawasan

Dalam pembangunan hutan tanaman tidak terlepas dari rencana pengelolaan kawasan. Oleh

karenanya pembangunan hutan tanaman harus direncanakan secara matang agar tidak menimbulkan kerusakan kawasan. Hutan tanaman hanya dikembangkan pada areal kosong dan hutan alam yang rusak berat (tidak memungkinkan untuk terjadinya suksesi secara alami) dengan fungsi kawasan hutan produksi.

3. Pengelolaan lingkungan

Aspek lingkungan sangat penting untuk diperhatikan agar dalam pengembangannya tidak menimbulkan kerusakan potensi sumber daya alam. Kaidah-kaidah konservasi harus diperhatikan untuk menjaga keutuhan sumber daya alam yang merupakan modal utama dalam pembangunan hutan tanaman.

4. Sosial, ekonomi dan budaya

Disamping memberikan manfaat langsung dengan menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha kepada masyarakat setempat, pembangunan hutan tanaman harus peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya, kearifan tradisional dan struktur masyarakat agar tidak menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya.

5. Penataan ruang

Dalam mendukung pembangunan hutan tanaman, kebijakan penataan ruang dilakukan dengan pendekatan secara terpadu dan terkoordinasi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Peningkatan keterkaitan fungsi pembangunan hutan tanaman dengan sektor lain dan pemanfaatan rencana pengembangan wilayah secara nasional yang dalam hal ini harus terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RTRK, RTRWP serta aturan-aturan dan kesepakatan di daerah.

6. Peraturan perundangan

Pembangunan hutan tanaman dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan konvensi internasional dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekosistemnya.

7. Target Fisik (jangka panjang)

Terbentuknya hutan tanaman pada areal kosong dalam unit-unit usaha yang ekonomis, mandiri dan lestari dengan luas setara luas lahan kosong.

Tidak terdapat areal kosong, padang alang-alang dan semak belukar di dalam kawasan hutan produksi.

Berkembangnya kelembagaan ekonomi masyarakat lokal yang mantap dan mandiri dengan tingkat kesejahteraan di atas rata-rata nasional.

8 Langkah masa transisi (jangka pendek)

Mendorong peningkatan peran dana swasta dalam perusahaan HTI Patungan melalui proses restrukturisasi pendanaan.

Mengadakan evaluasi kinerja perusahaan HTI, serta membatalkan ijin bagi pelaksana yang tidak serius.

Menyelesaikan kasus per kasus konflik lahan HTI dengan masyarakat lokal dengan prinsip tidak melepaskan kawasan hutan melalui

pengembangan kemitraan dan budidaya tanaman non hutan yang cepat menghasilkan.

Mengupayakan iklim kondusif dalam investasi HTI melalui deregulasi dan debirokratisasi dalam pelayanan, antara lain menyederhanakan prosedur perijinan, persyaratan permohonan, mengembangkan *self approval* (RKT dan FS tidak perlu disahkan oleh pemerintah), membantu kepastian pasar.

Menyusun perangkat peraturan perundang-undangan, sekaligus mencabut yang sudah tidak relevan.

Tabel 8. Lingkungan Internal

Table 8. *Internal Environment*

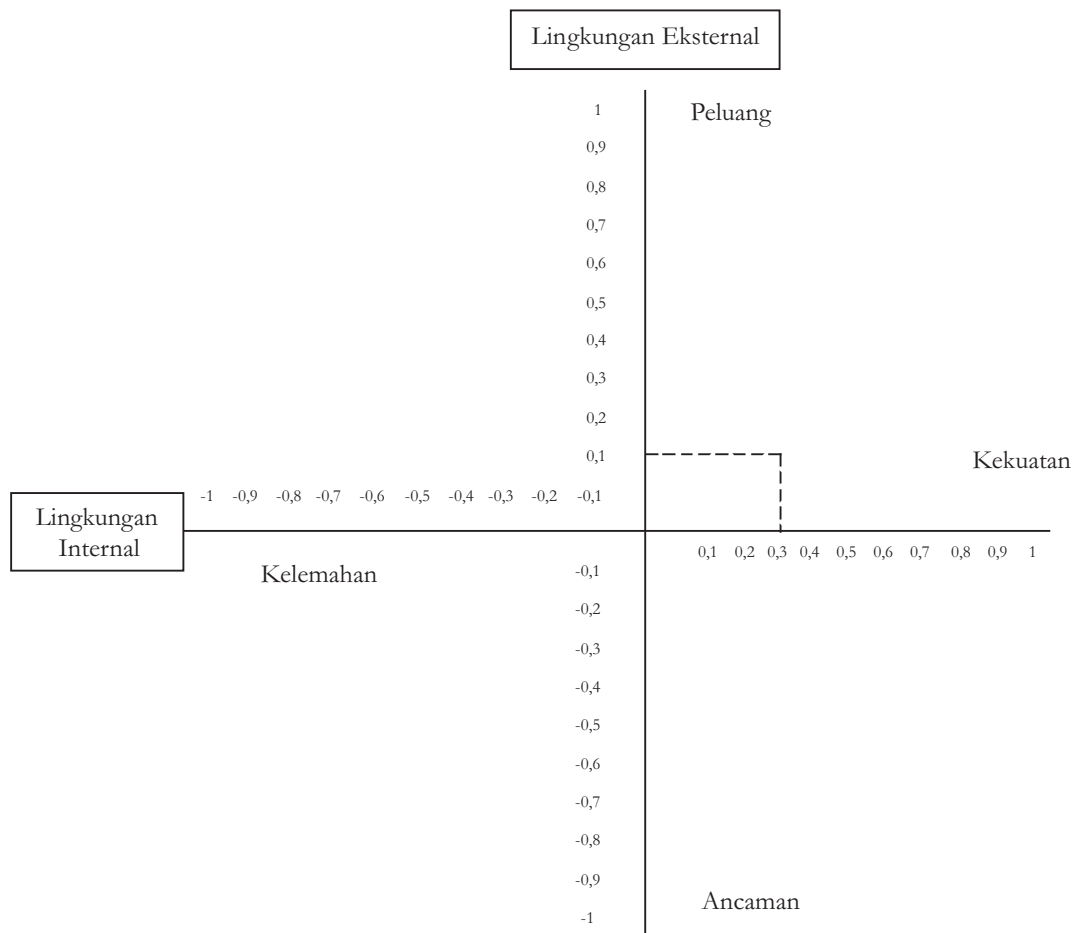
No	Faktor/ <i>Factors</i>	Bobot/ <i>weight</i>	Peringkat/ <i>Rating</i>	
A	Kekuatan			
	Sumber Daya Hutan (SDH) luas, jenis beragam, potensi riap tinggi belum dimanfaatkan.	0,107	3	0,321
	Komitmen semua pihak terhadap desentralisasi tinggi.	0,101	4	0,404
	Komitmen pemerintah untuk melestarikan hutan, memajukan industri dan menggalakan ekspor tinggi.	0,099	3	0,297
	Daya saing produk industri primer tinggi, net ekspor masih berlangsung.	0,101	2	0,202
	Nilai aset (kapasitas) besar, orientasi ekspor, penguasaan teknologi cukup memadai.	0,095	3	0,285
				1,509
B	Kelemahan			
	Pendapatan HTI jangka panjang.	(0,107)	3	(0,321)
	Usaha hutan alam lebih menarik dibandingkan dengan usaha HTI.	(0,095)	2	(0,190)
	Kelembagaan HTI lemah (sistem perundang-undangan belum ter-integrasi)	(0,101)	2	(0,202)
	Sulitnya memperoleh areal HTI yang solid dan bebas konflik.	(0,097)	3	(0,291)
	Harga kayu hasil dari HTI lebih kecil (<) dari harga kayu hutan alam.	(0,097)	2	(0,194)
				(1,198)
	Jumlah	1		0,311

Tabel 9 Lingkungan Eksternal

Table 9 External Environment

No	Faktor/ <i>Factors</i>	Bobot/ <i>Weight</i>	Peringkat/ <i>Rating</i>	
A	Peluang			
	Kepedulian masyarakat internasional terhadap hutan Indonesia.	0,097	3	0,291
	Tersedianya teknologi maju.	0,101	3	0,303
	Pangsa pasar terbuka luas.	0,102	3	0,306
	<i>Supply</i> tenaga kerja cukup.	0,099	3	0,297
	Nilai produk kayu hutan tanaman tinggi.	0,097	3	0,291
				1,488
B	Ancaman			
	Penegakan hukum lemah.	(0,102)	2	(0,204)
	Pemerataan dan ke tidakadilan faktor sosial, ekonomi dan lain sebagainya.	(0,095)	3	(0,285)
	<i>Illegal logging</i> masih belum dapat diatasi.	(0,089)	3	(0,267)
	Kemiskinan masyarakat di sekitar hutan dan kesulitan dalam mengendalikan konflik sosial.	(0,101)	3	(0,303)
	Produktivitas tenaga kerja rendah.	(0,107)	3	(0,321)
				(1,380)
	Jumlah	1		0,108

Gambar Diagram Analisa SWOT di Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 2. Diagram Analisa SWOT

Figure 2. SWOT Analysis Diagram

Tabel 10. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Strategi Pengembangan Hutan Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur

Table 10. Internal and External Environment Strategy Forest Plantation Development in East Kalimantan Province

INTERNAL		
EKSTERNAL	Strengths <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber Daya Hutan (SDH) luas, jenis beragam, potensi riap tinggi belum dimanfaatkan. ▪ Komitmen semua pihak terhadap desentralisasi tinggi. ▪ Komitmen pemerintah untuk melestarikan hutan, memajukan industri dan menggalakan ekspor tinggi. ▪ Daya saing produk industri primer tinggi, net ekspor masih berlangsung. ▪ Nilai aset (kapasitas) besar, orientasi ekspor, penguasaan teknologi cukup memadai. 	Weaknesses <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan HTI jangka panjang. • Usaha hutan alam lebih menarik dibandingkan dengan usaha HTI. • Kelembagaan HTI lemah (sistem perundang-undangan belum ter-integrasi) • Sulitnya memperoleh areal HTI yang solid dan bebas konflik. • Harga kayu hasil dari HTI lebih kecil (<) dari harga kayu hutan alam.
	Strengths-Opportunities. <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) hutan tanaman secara intensif dan kompetitif • Pengembangan industri per kayu-an berorientasi ekspor. • Pengembangan ekspor produk kayu hutan tanaman yang mempunyai nilai tambah tinggi 	Weaknesses-Opportunities <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan hutan tanaman yang ada secara ekstensif dan pemanfaatan sumber bahan baku alternatif • Pengembangan industri per kayu-an sekunder yang berorientasi pasar domestik tanpa mengabaikan produk kayu primer untuk di ekspor • Pengembangan pasar domestik produk kayu dari hutan tanaman
EKSTERNAL	Opportunities <ul style="list-style-type: none"> • Kepedulian masyarakat internasional terhadap hutan Indonesia. • Tersedianya teknologi maju. • Pangsa pasar terbuka luas. • <i>Supply</i> tenaga kerja cukup. • Nilai produk kayu hutan tanaman tinggi. 	
	Threats <ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum lemah. • Pemerataan dan ke tidakadilan faktor sosial, ekonomi dan lain sebagainya. • <i>Illegal logging</i> masih belum dapat diatasi. • Kemiskinan masyarakat di-sekitar hutan dan kesulitan dalam mengendalikan konflik sosial. • Produktivitas tenaga kerja rendah. 	Strengths-Threats. <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan hutan tanaman intensif dan kolaboratif. • Pengembangan industri per-kayuan sekunder beskala kecil dan menengah yang mampu menyesuaikan dengan perubahan pasar dan teknologi. • Diversifikasi produk dan pengalihan pasar.
EKSTERNAL		Weaknesses-Threats <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan hutan tanaman pada lahan non produktif secara kolaboratif. • Pemanfaatan sumber bahan baku alternatif dan peningkatan efisiensi pengolahan • Mempertahankan pasar yang ada atau mengalihkan pasar

Sumber (source): Data diolah (calculated data)

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Jaminan kepastian usaha merupakan hal yang sangat penting dan harus dicarikan solusinya, karena merupakan prasyarat utama sebelum perusahaan menanamkan modalnya.
2. Pembangunan HTI Trans kayu pertukangan masih mempunyai kendala khususnya dalam permodalan, terutama setelah dana pinjaman

DR dan PMP di stop sejak tahun 1998.

3. Pembangunan HTI Pulp masih berjalan sesuai rencana, karena kebanyakan merupakan grup dari pabrik kertas, sehingga ada jaminan kepastian pemasaran kayunya.
4. Tanpa adanya *law enforcement* yang nyata, maka nilai dari hutan alam akan tetap seperti saat ini dan *illegal logging* akan terus berkembang dan tidak jarang industri memanfaatkan hasil-hasil kayu *illegal logging* dengan harga yang murah.

B. Saran

1. Membangun dialog dan komunikasi dengan masyarakat sekitar areal pembangunan hutan tanaman agar terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dengan pemegang IUPHHK-HT untuk meminimalkan konflik sosial.
2. Membentuk forum komunikasi, mengembangkan konvensi : mekanisme penyelesaian konflik dan kompensasi yang melibatkan semua pihak (masyarakat, pemerintah, perusahaan, LSM, tokoh adat, tokoh agama dan lain-lain).
3. Diadakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar areal IUPHHK-HT untuk mencegah terjadinya konflik sosial.
4. Kejelasan serta kepastian hak adat atas lahan dan hukum adat perlu diupayakan untuk dipertegas dan diformalkan oleh pemerintah sehingga efektivitas dalam pengelolaannya bisa lebih optimal.
5. Adanya upaya untuk menarik investor dengan melakukan pengelompokkan kembali areal HTI dan memberikan izin untuk melakukan penanaman jenis tanaman campuran dalam areal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim 2006. Workshop Program Jaringan Kerja. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman. Bogor.
- Anonim, 2009. Direktorat Bina Pengembangan HTI. Mempercepat Pembangunan HTI Menuju Tahun 2009. Seminar Pembangunan HTI dan Pengembangan Industri Pulp di Indonesia. Jakarta.
- Dirjen BUK, 2011. Data Release Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Tahun 2011. Jakarta.
- Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, 2008. Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Samarinda.
- Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, 2011. Statistik Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011. Samarinda.
- Dirjen Planologi, 2011. Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan. Dirjen Planologi. Jakarta.
- Hendromono, Arisman. 2001. Prosiding Pembangunan Hutan Tanaman Di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hasil Hutan. Yogyakarta.
- IWGFF, 2010. Perkiraan Penggunaan Sumber Bahan Baku Industri Pulp dan Paper. Studi Advokasi PT. RAPP dan PT. IKPP di Povinsi Riau. Jakarta.
- Rangkuti, F. 2006. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis : Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk menghadapi Abad 21, Cetakan kedua belas, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sugiyono., 2004. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Ketujuh. Alfabeta. Bandung.